



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2446-2459

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Transmisi Kebijakan Moneter dan Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi

Fildzah Darayani Mujasmara<sup>1✉</sup>, Rebecka Tri Talita Panggabean<sup>2</sup>, Mei Sarah Andriani Tobing<sup>3</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [fildzahdarayani05@gmail.com](mailto:fildzahdarayani05@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan moneter dan peran bank sentral dalam mencapai stabilitas ekonomi, serta mengeksplorasi peran bank sentral dalam sistem keuangan suatu negara, termasuk pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya perbankan dalam sistem ekonomi dan keuangan, serta pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk mengawasi kegiatan operasional dan investasi BI.

Kata Kunci: *Stabilitas Perbankan Indonesia, Kebijakan Moneter*

## Abstract

The method for writing this scientific article is a qualitative method. This research aims to examine monetary policy and the role of central banks in achieving economic stability, as well as exploring the role of central banks in a country's financial system, including controlling monetary policy, maintaining financial system stability, and providing support for currency value stability. Apart from that, this research also aims to highlight the importance of banking in the economic and financial system, as well as the formation of the Bank Indonesia Supervision Agency (BSBI) to supervise BI's operational and investment activities.

Keywords: *Indonesia Banking Stability, Monetary Policy*

## PENDAHULUAN

Salah satu tugas terpenting yang harus diemban oleh setiap pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, adalah tercapainya stabilitas perekonomian. Karena dengan tercapainya stabilitas ekonomi, kegiatan-kegiatan pembangunan (ekonomi) lebih mudah untuk dijalankan. Stabilitas ekonomi suatu negara dapat diusahakan dengan banyak jalan, namun hampir pasti bersinggungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut, yaitu fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berhubungan dengan seluruh instrumen ekonomi yang menggunakan sumber daya anggaran negara (APBN). Sementara itu, kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan perekonomian yang menggunakan instrumen suku bunga, inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter ini semuanya ada dalam kendali Bank Bentral (Bank Indonesia). Kemajuan dan sekaligus instabilitas sektor keuangan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir menjadikan kebijakan moneter sangat relevan untuk ditelaah sehingga nantinya berpotensi menyumbangkan stabilitas ekonomi yang diidamkan.

Pada umumnya kebijakan moneter berpengaruh pada perputaran uang dalam ekonomi, yang tercermin pada perkembangan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta berbagai variabel ekonomi dan keuangan lainnya. Bahkan kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar keuangan dan di berbagai aktivitas ekonomi seperti ditunjukkan dengan pelemahan mata uang di seluruh dunia.

Dalam tataran teori ekonomi moneter dan prakteknya di berbagai bank sentral, transmisi kebijakan moneter juga selalu menjadi topik yang penting dan menarik perhatian para ekonom dan otoritas moneter. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan juga

sering muncul di masyarakat. Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004. tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki instrumen moneter seperti Operasi Pasar Terbuka (OPT), intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing, fasilitas diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme transmisi yang terjadi dari awal instrumen moneter ini ditempuh Bank Indonesia hingga selanjutnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir kebijakan moneter tersebut.

Stabilitas sistem perbankan dan moneter merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling menentukan satu sama lain. Mencerminkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, kondisi perbankan berada dalam kondisi baik dan fungsi intermediasi internal bank berjalan normal. Menggerakkan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya untuk memasuki dunia usaha. Apabila kondisi tersebut tetap terjaga, maka proses perputaran moneter dan transmisi kebijakan moneter di sebagian besar perekonomian melalui sistem perbankan juga dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, stabilnya sistem perbankan akan menentukan efektivitas penerapan kebijakan moneter.

Di sisi lain, menjaga stabilitas mata uang juga akan berdampak besar terhadap stabilitas sistem perbankan. Secara umum stabilitas mata uang tercermin dalam pengendalian inflasi, nilai tukar, suku bunga, jumlah uang (misalnya jumlah uang beredar) dan kredit. Perkembangan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga merupakan tiga faktor risiko pasar utama yang dihadapi perbankan. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiga hal tersebut semakin stabil, maka indikatornya akan semakin kecil, maka risiko pasar yang dihadapi bank akan semakin kecil. Hal ini mendukung terjaganya stabilitas sistem perbankan. Sebaliknya, jika tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar meningkat sehingga memerlukan kebijakan yang lebih ketat, maka suku bunga mata uang akan naik dari tingkat yang tinggi, dan bank juga akan menghadapi risiko pasar yang lebih besar, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas sistem perbankan.

#### Transmisi Kebijakan Moneter

Transmisi Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas harga (pengendalian inflasi) dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral menggunakan alat kebijakan seperti suku bunga, persyaratan cadangan, dan operasi pasar terbuka untuk

mempengaruhi tingkat inflasi dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya. Beberapa alat utama melibatkan pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga dan ketersediaan kredit.

Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu profesi di bidang perbankan erat hubungannya dengan perannya dalam proses penciptaan uang yang hampir seluruhnya berkelanjutan dalam suatu perekonomian melalui sistem perbankan. Dengan peran tersebut, kondisi industri perbankan akan sangat menentukan seberapa efektif transmisi kebijakan moneter bank sentral dapat mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral menggunakan instrumen moneter, baik operasi pasar terbuka atau lainnya, untuk menjalankan kebijakan moneter dan mencapai tujuan akhir yang diinginkan, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tindakan ini mempengaruhi aktivitas perekonomian melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter yaitu mata uang, kredit, dan suku bunga, biasanya melalui sistem perbankan.

#### Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter sebagaimana didefinisikan oleh Napitupulu I.H. (2001), merupakan kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian. Menetapkan standar suku bunga untuk pinjaman, mewajibkan bank memiliki modal, dan bahkan memberikan pinjaman sebagai upaya terakhir atau bernegosiasi dengan pemerintah lainnya adalah contoh kebijakan moneter. Proses pengendalian jumlah uang yang tersedia untuk tujuan tertentu disebut kebijakan moneter. Standar suku bunga pinjaman dan kapitalisasi bank juga ditentukan oleh kebijakan moneter, dapat juga disebut sebagai peminjam komersial terakhir resor.

Kebijakan moneter pada dasarnya memiliki dua bagian: keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga mata uang dan pemerataan pembangunan merupakan indikator keseimbangan internal Indonesia. Mari kita lihat neraca eksternal dari perspektif pembayaran utang luar negeri. Ekonomi makro bertumpu pada dua keseimbangan, dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan Indonesia, kesempatan kerja yang luas, harga pasar yang stabil, dan neraca pembayaran yang lancar dan seimbang.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji dan menelaah sesuai dengan teori yang dibahas khususnya di lingkup konsep peran Transmisi Kebijakan Moneter dan Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi yang metodologis.

Menurut Saryono (2010) mengungkapkan bahwa studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral menggunakan instrumen kebijakan seperti suku bunga, cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka untuk memengaruhi tingkat inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Milton Friedman kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga pertumbuhan jumlah uang yang moderat dan stabil. Ia mengemukakan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa inflasi terkait dengan pertumbuhan berlebihan dalam jumlah uang yang beredar.

Menurut John Maynard Keynes menyoroti peran kebijakan moneter dalam mengatur tingkat suku bunga untuk merangsang atau meredakan investasi. Ia menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi ketidakstabilan.

### Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter adalah alat-alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneter mereka. Beberapa instrumen utama melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter umum:

1. Suku Bunga: Bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunga untuk memengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Peningkatan suku bunga dapat mengurangi pengeluaran dan investasi, sementara penurunan suku bunga dapat mendorong aktivitas ekonomi.

2. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operations): Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar. Pembelian surat berharga meningkatkan uang yang beredar, sementara penjualan surat berharga mengurangnya.
3. Cadangan Wajib: Bank sentral dapat menetapkan tingkat cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank komersial. Penyesuaian cadangan wajib dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman.
4. Lelang (Discount Rate): Bank sentral dapat mengubah discount rate, yaitu suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada bank komersial. Perubahan discount rate dapat mempengaruhi suku bunga secara keseluruhan di pasar.
5. Kebijakan Kredit dan Pembatasan Kredit: Bank sentral dapat memberlakukan kebijakan kredit khusus atau membatasi akses bank komersial ke kredit tertentu untuk mengendalikan ketersediaan kredit.
6. Forward Guidance: Bank sentral memberikan sinyal atau pedoman tentang arah kebijakan masa depan, termasuk rencana untuk suku bunga atau kebijakan lainnya. Hal ini dapat memengaruhi ekspektasi pasar.

Instrumen-instrumen ini digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneter seperti menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas keuangan. Kombinasi instrumen yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan spesifik.

#### Ragam Sasaran Kebijakan Moneter

Dalam hubungannya untuk mencapai stabilitas ekonomi, kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Namun, kebanyakan negara menerapkan empat hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter (Pohan, 2008), yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan; (2) Kesempatan kerja; (3) Kestabilan harga; (4) Keseimbangan neraca pembayaran pertumbuhan ekonomi berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Kestabilan harga perlu dijaga agar dapat mendukung kegiatan perekonomian dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Demikian pula kondisi neraca pembayaran yang menjadi rapor transaksi lalu lintas barang dan jasa suatu negara, yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kekuatan ekonomi nasional.

Secara acuan, semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara serempak dan optimal. Namun, sering kali kebijakan yang diambil hanya berhasil pada sebagian sasaran ataupun bersifat kontradiktif dengan kondisi sasaran yang lain. Sehingga sangat

sukar untuk mencapai semua sasaran secara serempak dan optimal. Misalnya, jika bank sentral dalam keadaan tertentu hendak melakukan ekspansi moneter (melalui penambahan jumlah uang beredar) yang berguna untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut disatu sisi dapat memenuhi sasaran yang ingin dicapai (pertumbuhan ekonomi), namun tindakan tersebut tidak menguntungkan bagi stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran karena langkah ekspansi moneter tersebut berpotensi menimbulkan inflasi. Sebaliknya, perlakuan kebijakan moneter yang ketat akan menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, namun konsekuensinya adalah penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan moneter harus dilakukan dengan berhati-hati dan dipertimbangkan secara komprehensif.

### Problem Kebijakan Moneter

Senada dengan ultimate goal kebijakan moneter yang dikemukakan, Indonesia juga berupaya mengatasi problem mendasar seperti yang dialami oleh negara-negara lainnya. Kebijakan moneter yang diterapkan akan selalu berhadapan dengan tantangan globalisasi keuangan, sinkronisasi kebijakan fiskal, situasi makro ekonomi, tata niaga, dan kondisi distribusi yang memengaruhi inflasi (misalnya volatile foods). Di luar itu, strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya stabilitas ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter.

Dari sisi kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang dilalui lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dengan masih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya inflasi, kebijakan moneter yang hati-hati (prudent) pada mulanya lebih ditekankan pada pengendalian jumlah uang beredar melalui pencapaian sasaran operasional uang primer. Di sini, jenis kebijakan dan sasaran moneter yang dikawal BI mengalami evolusi sesuai dengan pasang-surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia.

Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk memengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi BI dalam merumuskan kebijakan moneternya (Warjiyo & Solikin, 2004). Pastinya kebijakan moneter yang ditetapkan BI mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Korelasi kebijakan moneter terhadap perekonomian nasional biasanya terdiri dari empat jalur, yaitu efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, dan

efek ekspektasi masyarakat. Keempat jalur itulah yang menjadi hubungan sebab akibat antara kebijakan moneter dengan perekonomian secara makro. Relasi yang demikian kompleks ini pula yang harus menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan moneter untuk menentukan target kebijakan moneter yang akan dituju dan bagaimana strategi pencapaiannya.

#### Peran Kebanksentralan dalam Stabilitas Ekonomi

Bank sentral memiliki beberapa peran kunci dalam sistem keuangan suatu negara. Beberapa peran utama tersebut melibatkan pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Berikut adalah beberapa peran umum dari bank sentral:

1. Kebijakan Moneter: Bank sentral bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengendalikan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kredit. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
2. Pengawasan Sistem Keuangan: Bank sentral memainkan peran kunci dalam pengawasan dan regulasi lembaga-lembaga keuangan. Ini mencakup bank komersial, institusi keuangan non-bank, dan pasar keuangan, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
3. Penerbitan Mata Uang: Bank sentral memiliki hak untuk menerbitkan dan mengelola mata uang negara. Mereka bertanggung jawab atas cetakan, distribusi, dan manajemen mata uang, serta menjaga integritas dan kestabilan nilai mata uang tersebut.
4. Pendukung Fiskal: Bank sentral dapat memberikan dukungan kebijakan fiskal dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Ini membantu dalam pembiayaan defisit anggaran dan mempengaruhi tingkat suku bunga.
5. Pemeliharaan Stabilitas Nilai Tukar: Bank sentral dapat berusaha untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Mereka dapat melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar atau menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ini.
6. Penanganan Krisis Keuangan: Bank sentral sering terlibat dalam menangani krisis keuangan, baik dengan memberikan likuiditas kepada lembaga-lembaga keuangan yang menghadapi kesulitan atau dengan merancang kebijakan darurat untuk mengatasi situasi krisis.

7. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran: Bank sentral berperan dalam menyelenggarakan dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Ini mencakup transfer dana, kliring, dan penyelesaian transaksi keuangan.

Peran bank sentral ini dapat bervariasi antar negara tergantung pada struktur ekonomi, sistem keuangan, dan mandat hukum yang diberikan kepada bank sentral oleh pemerintah.

Bank sentral memiliki peran krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Beberapa peran utama bank sentral dalam konteks ini melibatkan:

1. Mengendalikan Inflasi: Salah satu peran utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Dengan merancang kebijakan moneter yang tepat, bank sentral berusaha untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga Stabilitas Mata Uang: Bank sentral berupaya memelihara stabilitas nilai mata uang nasional. Nilai tukar yang stabil dapat menciptakan kepercayaan di pasar, mendorong perdagangan internasional, dan memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi.
3. Mengatur Tingkat Suku Bunga: Bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen terkait pinjaman dan investasi. Dengan mengatur suku bunga, mereka dapat merespons perubahan kondisi ekonomi dan mengarahkan aktivitas ekonomi ke arah yang diinginkan.
4. Memelihara Pertumbuhan Ekonomi yang Seimbang: Bank sentral berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Mereka menggunakan kebijakan moneter untuk menghindari fluktuasi ekonomi yang berlebihan, seperti resesi atau booming ekonomi yang tidak stabil.
5. Memberikan Kepastian dan Forward Guidance: Bank sentral sering memberikan informasi atau pedoman (forward guidance) kepada pasar mengenai arah kebijakan moneter masa depan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian di pasar dan memengaruhi ekspektasi pelaku ekonomi.
6. Penyelenggaraan Operasi Pasar Terbuka: Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah dapat memengaruhi likuiditas di pasar dan mendukung tujuan kebijakan moneter.

7. Stabilisasi Sistem Keuangan: Bank sentral memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi dan merespons risiko-risiko sistemik. Mereka dapat memberikan likuiditas tambahan atau merancang kebijakan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan.

Dengan menjalankan peran-peran ini, bank sentral berkontribusi secara signifikan untuk menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

#### Fungsi Penting Perbankan dalam Stabilitas Ekonomi

Perbankan pada dasarnya adalah lembaga perantara keuangan yang dalam operasinya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian, lembaga ini menanamkan dana simpanan tersebut dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha maupun bentuk portofolio aset finansial seperti surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral. Dari sudut pandang ekonomi, karakteristik operasi perbankan seperti ini memiliki kekhususan dalam fungsinya daripada lembaga keuangan lain, setidaknya dalam tiga aspek penting berikut ini (Guitan, 1997; George, 1997).

*Pertama*, dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan untuk simpanan dana masyarakat, perbankan mempunyai fungsi khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Simpanan masyarakat pada perbankan, bersamaan dengan uang kartal yang beredar di masyarakat, merupakan komponen uang yang beredar baik dalam arti sempit (M1: uang kartal dan uang giral yaitu simpanan giro) ataupun arti luas (M2 M1 dan uang kuasi yaitu tabungan deposito). Dengan adanya perbankan, berbagai transaksi keuangan dan ekonomi yang awalnya dilakukan secara barter dan terbatas kemudian dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Kondisi ini juga didukung oleh mekanisme sistem pembayaran yang sudah semakin berkembang, dari transaksi berbasis tunai pada ekonomi tradisional menjadi transaksi berbasis non-tunai (seperti transfer melalui kliring ataupun menggunakan kartu elektronik) pada ekonomi modern terlebih lagi dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran melalui Real Time Gross Settlement (RTGS), proses penyelesaian pembayaran berbagai transaksi dalam ekonomi bisa semakin cepat, dilakukan secara serentak, dan dalam jumlah yang besar (high value payments).

*Kedua*, dalam fungsinya sebagai lembaga interediasi keuangan, perbankan mempunyai fungsi khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Dengan adanya peran ini,

perilaku menabung pada masyarakat dapat terdorong dan kebutuhan pembiayaan untuk berbagai kegiatan produksi dan investasi dalam ekonomi dapat terpenuhi. Begitu juga dengan para debitur akan lebih mudah dalam memperoleh kredit atau pembiayaan untuk kebutuhan berbagai aktivitas produksi dan investasinya. Dengan begitu, mobilisasi dan alokasi sumber-sumber dana dalam ekonomi dapat semakin besar dan berlangsung lebih mudah serta efisien. Dalam hal kebijakan moneter, fungsi intermediasi keuangan yang dilakukan perbankan seperti ini dapat menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan target yang ingin dicapai, khususnya stabilitas harga dalam ekonomi. Perbankan memiliki peran penting dalam transmisi kebijakan moneter, khususnya saluran uang, saluran kredit, dan saluran suku bunga karena proses perputaran uang berlangsung melalui perbankan.

*Ketiga*, dalam fungsinya sebagai lembaga penanaman aset finansial, perbankan mempunyai peran penting dalam pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar uang domestik dan valuta asing. Dari karakteristik operasi yang dilakukan, perbankan berguna untuk mentransformasi suatu aset finansial, yaitu simpanan masyarakat, ke dalam bentuk aset finansial lain, yaitu kredit dan penanaman dalam bentuk surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral. Transaksi keuangan yang dilakukan dapat berlangsung baik itu dalam pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing. Demikian pula dengan produk keuangan yang ditransaksikan terus berkembang, dari transaksi secara outright (tunai atau spot), repurchase agreement, spot atau forward, maupun jenis-jenis transaksi yang lain. Meskipun tidak semua transaksi keuangan tersebut terkait langsung dengan transaksi ekonomi ril yang melandasinya perputaran uang maupun hasil penanaman investasi akan mengalami peningkatan dan perluasan dari berbagai transaksi keuangan tersebut.

Ketiga fungsi di atas menempatkan perbankan pada peran khusus di dalam sistem ekonomi dan keuangan baik dari perspektif mikro maupun makro. Dari perspektif mikro, dapat dilihat bahwa keberadaan perbankan diperlukan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menyimpan dana, memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, dan karenanya keamanan dan kesehatan bank secara individual penting untuk dijaga serta dipelihara. Sementara dari perspektif makro, keberadaan dan stabilitas perbankan secara industri maupun sistem diperlukan tidak hanya karena pentingnya peran perbankan dalam

proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, tetapi juga dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi.

### Ruang Lingkup Pengawasan BSBI

Pada masa lalu banyak peristiwa pahit yang membuat posisi BI terpuruk, meskipun dalam beberapa aspek tertentu kebijakan itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lain yang lebih besar (yang diinisiasi oleh pemerintah). Kasus kebijakan BLBI dan bailout Bank Century merupakan contoh kebijakan BI yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan desain kebijakan pemerintah. Dari pengalaman tersebut, publik mendesak perlunya lembaga yang dapat mengawasi BI. Permintaan itu disambut oleh DPR RI, dengan dimasukkannya salah satu pasal revisi UU BI No. 3/2004 sebagai amandemen atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal tersebut tertuang dalam Pasal 58A yang menetapkan adanya lembaga pengawas BI tersebut, yang dikenal dengan sebutan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, yang bertujuan mengupayakan peningkatan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Maksud dari pengawasan di bidang tertentu di sini adalah melaksanakan tugas (Bank Indonesia, 2009:3): (1) telaahan atas laporan keuangan tahunan BI; (2) telaahan atas anggaran operasional dan investasi BI; (3) telaahan atas prosedur pemungutan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya BSBI tidak melakukan penilaian terhadap kinerja dewan gubernur, tidak ikut mengambil keputusan, serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang membuat penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI tersebut disampaikan kepada DPR, khususnya kepada Komisi XI. Selanjutnya, DPR mengevaluasi BI sesuai laporan yang disampaikan BSBI. Dari obyek penelaahan yang menjadi tugas BSBI, berkaitan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, dan kewajiban BI menyampaikan laporan kepada DPR untuk kemudian dievaluasi oleh DPR, terlihat bahwa pembentukan BSBI diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan operasional dan investasi BI.

Terkait dengan tugas BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, eksistensi badan ini tidak mengurangi independensi BI. Hal ini mengingat dalam melaksanakan tugasnya itu BSBI tidak boleh mencampuri dan tidak boleh menilai kebijakan BI (di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan

bank, serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter), serta tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur (Santoso & Koentoadji, 2005).

Kedudukan BSBI ini amatlah berbeda dengan kedudukan 2 (dua) badan yang ada pada tatanan kelembagaan yang digariskan pada UU No. 13/1968. Pertama, Komisaris Pemerintah seperti yang pernah diatur dalam Pasal 22 s/d 24 UU No. 13/1968 mengenai Bank Sentral, Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden dan tugasnya adalah mengawasi BI selaku perusahaan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Komisaris Pemerintah mempunyai hubungan kerja yang bersifat langsung dengan BI, sedangkan dalam hal kedudukan BSBI tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan BI, melainkan dengan DPR. Dalam konteks ini, BSBI mempunyai keperluan untuk berhubungan langsung dengan BI, maka tentunya badan ini terlebih dahulu harus memperoleh penugasan dari DPR. Kedua, BSBI pun berbeda dari Dewan Moneter sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 8 sd 14 UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Sentral, mengingat Dewan Moneter yang beranggotakan menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia bertugas mendukung pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter, sedangkan kedudukan BSBI adalah sebagai pembantu DPR untuk menelaah laporan/prosedur yang terkait dengan kegiatan/anggaran operasional BI, di luar kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran (Santoso & Koentoadji, 2005).

## SIMPULAN

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit, yang bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral memiliki peran kunci dalam sistem keuangan suatu negara, termasuk pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memberikan dukungan pada stabilitas nilai mata uang. Selain itu, pentingnya perbankan dalam sistem ekonomi dan keuangan juga disoroti, serta pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk mengawasi kegiatan operasional dan investasi BI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeoye (2017) Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Kelompok Makroekonomi di Nigeria, *Jurnal Ilmu Sosial dan Caleb*, Volume 3, Nomor 2: 115 – 134.
- Awad, Ibrahim (2010), Mekanisme transmisi moneter di perekonomian terbuka kecil : Kasus Mesir, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XIV – 2011, edisi 1: 73-96
- Bank Indonesia,(2018), Transmisi Kebijakan Moneter, <https://www.bi.go.id/id/id/money/transmissionpolicy/Isi/Default.aspx>.
- Doddy Zulverdi (1998). Menggunakan suku bunga sebagai target operasional Kebijakan Moneter di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, nomor 1.
- Dwi astute (2020) transmisi kebijakan moneter di indonesia jurnal Ilmiah universitas brawijaya
- Doddy Zulverdi (1998). Menggunakan suku bunga sebagai target operasional Kebijakan Moneter di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 1, nomor 1.
- Herlina (2013), Identifikasi mekanisme transmisi kebijakan moneter 2000-2011, *Majalah Performance*, Vol.17.No.2: 158-173
- Perry (2004), Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Penelitian Bank Sentral (PPSK) , Bank Indonesia, Jakarta
- Warjiyo, Perry. "Stabilitas sistem perbankan dan kebijakan moneter: keterkaitan dan perkembangannya di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 8.4 (2006): 429-454.
- Yustika, Ahmad Erani, and Eka Heni Sulistiani. "Kebijakan moneter, sektor perbankan, dan peran badan supervisi." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 14.3 (2010): 447-458.